

# HUMANIKA

Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum

Volume 3 Nomor 1, Maret 2003

- **Reformasi TNI Menuju Indonesia Baru.**  
*Sunarso*
- **Ideologi Pendidikan dan Hegomoni Negara.** *Farida Hanum*
- **Makna Simbolik-Filosofis Kedudukan Raja dalam Politik Pemerintahan pada Motif Batik Kawung Kraton Yogyakarta.**  
*A. Daliman*
- **Studi tentang Wacana Politik Islam di Indonesia.** *Marzuki*



UNIT PELAKSANA TEKNIS MATA KULIAH UMUM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

**Pengantar Redaksi.** /ii

**Daftar Isi.** /iii

**Reformasi TNI Menuju Indonesia Baru.** *Sunarso* / 1-14.

**Konflik Batas Wilayah Laut dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Implementasi Wawasan Nusantara).** *L. Andriani Purwastuti* / 15-29.

**Arah Kebijakan Investasi di Indonesia dalam Rangka Otonomi Daerah.** *Eny Kusdarini* / 30-41.

**Pandangan Teori Konflik terhadap Masyarakat Majemuk.** *Sigit Dwi Kusrahmadi* / 42-52.

**Ideologi Pendidikan dan Hegemoni Negara.** *Farida Hanum* / 53-68.

**Suatu Tinjauan terhadap Fenomena Degradasi Moral Kaum Terdidik di Indonesia.** *Iffah Nur Hayati* / 69-80.

**Permukiman Kelompok Miskin Kota dan Masalah Lingkungan Hidup Perkotaan.** *Bambang Syaeful Hadi* / 81-91.

**Makna Simbolik-Filosofis Kedudukan Raja dalam Politik Pemerintahan pada Motif Batik Kawung Kraton Yogyakarta.** *A. Daliman* / 92-103.

**Polemik antara Kalam dan Filsafat dalam Sejarah Pemikiran Islam.** *Amir Syamsudin* / 104-113.

**Studi tentang Wacana Politik Islam di Indonesia.** *Marzuki* / 114-128.

**Bank Syariah sebagai Alternatif Model Perbankan dalam Masyarakat Islam.** *Indarto Wahyu* / 129-142.

**Dialektika Pemikiran Keagamaan Muhammadiyah: Kontinuitas Tradisi dengan Modernisasi.** *Saefur Rochmat* / 143-155.

# REFORMASI TNI MENUJU INDONESIA BARU

Oleh: Sunarso

## Abstrak

*Militer di Indonesia, selain merupakan kekuatan pertahanan keamanan adalah juga merupakan kekuatan sosial politik yang tidak tanggung-tanggung pengaruhnya di panggung politik nasional Indonesia. Dengan konsep dwifungsi, militer Indonesia berkiprah pada hampir seluruh jabatan strategis yang semestinya menjadi porsi sipil. Tak urung, dengan konsep dwifungsinya militer senantiasa dikritik, baik secara terselubung maupun secara terang-terangan. Bahkan tidak sedikit yang meminta militer kembali ke barak dan berkonsentrasi sebagai militer profesional.*

*Dengan adanya perubahan besar pada masyarakat Indonesia sejak berhentinya Presiden Soeharto dari jabatannya tanggal 21 Mei 1998, sebetulnya TNI (dulu: ABRI) tidak tinggal diam. Di bawah tekanan kekuatan reformasi yang disponsori para mahasiswa, TNI telah melakukan reformasi internal. Reformasi internal tersebut selanjutnya dirumuskan dalam paradigma baru TNI dalam kebijaksanaan redefinisi, dari ABRI menjadi TNI, setelah Kepolisian RI keluar dari organisasi ABRI.*

*Reformasi TNI tidak bisa dilakukan sekejap, karena tidak semua sifat dan lingkungannya adalah hal-hal yang riil, ada pula yang virtual sifatnya. Yang pasti, TNI bersama segenap komponen masyarakat yang lain sadar bahwa berbagai tantangan berat masih menghadang dalam perjalanan kita menuju Indonesia Baru yang dicita-citakan.*

## Pendahuluan

Bergulirnya reformasi di Indonesia yang ditandai runtuhnya rezim Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Besar Soeharto berdampak pada tuntutan dan bahkan gugatan terhadap keterlibatan militer yang meluas di wilayah sipil. Keadaan ini bagaikan mimpi, karena sebelum era reformasi dapat dikatakan, bahwa berpikir untuk mengkritik militer pun diawasi apalagi mengucapkannya. Keterlibatan militer yang digugat itu, mulai dari kecenderungan militer untuk menguasai jabatan-jabatan sipil seperti gubernur, bupati,

serta jatah anggota DPR dan DPRD yang tanpa melalui pemilu, hingga pada keterlibatan militer di Aceh, Timor Timur, Irian Jaya, keterlibatan dalam pembebasan tanah, penanganan buruh, bisnis, perdagangan, dan sebagainya. Bentuk gugatan itu ada yang sangat keras dan bahkan cenderung ekstrim, bahkan militer diminta untuk *back to barack*. Karena sekali diberi kesempatan, akan merajalela seperti dalam era Orde Baru. Tetapi ada pula yang menuntut saatnya kini militer secara bertahap menarik personilnya dari jabatan sipil dan mundur dari DPR dan DPRD, serta hanya diberi wakil di MPR seperti golongan-golongan lain dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Ada pula yang *pro status quo*, dengan argumen bagaimanapun militer harus tetap berada di DPR dan DPRD serta MPR, meskipun secara perlahan jabatan-jabatan sipil akan ditinggalkan.

Hubungan sipil dan militer selalu saja menyita perhatian banyak pihak. Masyarakat sipil di Indonesia tidak akan pernah muncul secara wajar selama dominasi militer sangat kuat dan mencolok dalam wilayah-wilayah sipil. Dominasi militer dalam wilayah sipil telah menjadi penghalang proses demokratisasi. Salah satu indikatornya adalah terjadinya militerisasi birokrasi. Akibatnya fungsi-fungsi birokrasi yang seharusnya melayani dan mengayomi masyarakat dan warga negara, berbalik menjadi birokrasi yang mengawasi dan memata-matai rakyat. Padahal menurut Adam Schwarz dan Donald K. Emmerson, pengamat politik tentang Indonesia, sudah saatnya Indonesia kini menjadi negara yang bercorak supremasi sipil. Oleh karena itu, tuntutan minimalisasi peran militer dalam birokrasi adalah tuntutan yang wajar dan relevan untuk terus diperjuangkan. Sikap saling mengerti dan saling memahami posisi dan peran masing-masing di antara militer dan sipil merupakan prasyarat bagi terbentuknya negara yang demokratis. Prasangka-pasangka buruk, saling curiga yang hanya akan menambah kebencian di antara keduanya perlu dihindarkan. Bahasa-bahasa ancaman seperti libas, tembak mati, gebuk, ciduk, dan amankan yang lebih mengekspresikan kekuasaan, kekuatan, dan kekerasan harus dihapuskan. Sebaliknya cara-cara persuasif yang lebih mengedepankan kemanusiaan dan akal sehat harus dikembangkan untuk menggapai masyarakat madani yang demokratis sebagaimana yang dicita-citakan seluruh warga bangsa ini.

## **Hubungan Sipil dan Militer di Indonesia**

Jika dicermati wacana politik selama Orde Baru, akan ditemukan bahwa dikotomi sipil dan militer sebenarnya adalah sesuatu yang setengah diharamkan. Artinya para pejabat Indonesia selalu mengatakan bahwa dikotomi sipil dan militer itu tidak ada di Indonesia. Sejak kebangkitan Orde Baru dikotomi itu dikaburkan dan bahkan berusaha dikubur dari wacana perpolitikan resmi. Tampilnya militer sebagai kekuatan dominan di panggung politik Indonesia, tak terelakkan, menghapus tapal batas tradisional, wilayah sipil dan militer. Garis penyekat antara wilayah sipil dan militer bisa dianggap mengedepankan semangat "parokialisme" yang menantang semangat "kekeluargaan" yang ingin ditegakkan Orde Baru, dengan melihat sipil dan militer sebagai sesama anggota keluarga besar bangsa Indonesia (Nadjib Asca, 1999: 33). Terhempasnya wacana dikotomi sipil dan militer pada awal Orde Baru, menjadikan militer Indonesia semakin kuat dalam berbagai wilayah publik yang sebelumnya lebih dikenal sebagai wilayah sipil, seperti birokrasi, bisnis, partai politik dan sebagainya. Dengan mengedepankan wacana kekaryaan, militer menanggalkan baju seragamnya dan kemudian mengenakan kostum barunya menduduki jabatan-jabatan sipil.

Pada tahun 1955 ketika militer Indonesia merasa termarginalkan dalam perpolitikan Indonesia, Angkatan Darat menuntut adanya pemisahan yang jelas antara wilayah sipil dan wilayah militer, karena militer merasa diintervensi dengan beberapa kebijakan dan menuntut adanya pemisahan itu. Dengan demikian kita catat sebuah metamorfosis politik penting dan menarik. Karena ketika militer berposisi marginal dalam kehidupan sosial politik pada tahun 1955 mereka menuntut dibangunnya tapal batas yang jelas antara wilayah sipil dan militer. Sementara dalam keadaan militer dominan seperti sekarang mereka menuntut tidak usah dipermasalahkan dikotomi sipil dan militer tersebut.

Salah satu wacana publik terpenting yang berkaitan dengan kedudukan TNI dalam perpolitikan Indonesia adalah mengenai dwifungsi. Karena dwifungsi itulah yang menjadi pilar penyangga adanya fungsi dan peran yang dilakukan oleh militer dalam bidang-bidang nonmiliter. Tanpa adanya pengakuan dan pembenaran terhadap dwifungsi, maka runtuhlah segala peran yang dilakukan oleh TNI di lapangan non-militer.

Pada masa Orde Baru, keberadaan dwifungsi ABRI telah diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai sesuatu

yang niscaya, sebagai sesuatu yang *taken for granted*. Kalaupun ada sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kritik maupun gugatan terhadap dwifungsi ABRI, maka itu lebih banyak pada tataran teknis implementasi, bukan pada tataran substansi. Kita melihat bahwa hampir semua sikap resmi dari semua ormas-ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, PPP, Golkar, dan PDI, semuanya tidak ada yang memberikan problematik bagi dwifungsi ABRI. Sikap kritis terhadap dwifungsi datang dari kelompok-kelompok LSM dan kampus-kampus yang dalam wacana publik sesungguhnya sangat marjinal. Mengapa semua itu bisa terjadi? Semua itu disebabkan oleh keberhasilan politik Orde Baru dalam memaksimalkan kemajuan material dan modernisasi, reproduksi pengalaman traumatik terhadap krisis dan *chaos*. Orde Baru melakukan penggunaan strategi simbolik, menjadikan dwifungsi ABRI dalam satu tarikan nafas dengan UUD 1945 dan Pancasila (Nadjib Asca, 1999:37). Dwifungsi merupakan implementasi dan spirit kebersamaan dan kekeluargaan yang terdapat dalam UUD 1945 dan Pancasila. Dengan konstruksi demikian siapapun yang mengusik dan mempertanyakan dwifungsi bisa dianggap mengusik dan menggugat keberadaan Pancasila dan UUD 1945. Karena Pancasila dan UUD 1945 telah diformulasikan sebagai pilar utama negara, maka siapa saja yang mempertanyakan dan mengusik UUD 1945 dan Pancasila tentunya bisa dikategorikan sebagai subversif.

Pada sisi yang lain militer Indonesia menganggap dwifungsi adalah merupakan jati diri ABRI. Oleh karena itu, jika dwifungsi ABRI diubah maka sama dengan mengubah jati diri ABRI yang sudah dilahirkan pada tahun 1945. Lebih jauh, bahkan mereka mengkonstruksikan dwifungsi ABRI sebagai jati diri bangsa Indonesia. Dengan demikian mengubah dwifungsi berarti mengubah jati diri bangsa Indonesia. Inilah bentuk strategi konstruksi simbolik penting yang dilakukan oleh ABRI pada masa Orde Baru. Mempersoalkan dwifungsi pada masa rezim Orde Baru sama artinya akan berhadapan dengan mobilisasi seluruh kekuatan di ABRI. Karena itu siapapun yang mencoba untuk mengusiknya akan berhadapan dengan seluruh kekuatan bangsa. Penggunaan kata dwifungsi itu bukanlah sesuatu yang hampa nilai, bukan sesuatu yang hampa kepentingan. Tanpa sadar sesungguhnya secara sosiologis ketika semakin sering kita mendengar dan menggunakan kata tersebut, kita semakin terbiasa dapat menerima dan sekaligus membenarkan fungsi ganda itu. Ada proses transfer obyektivasi linguistik, kemudian secara massal akan membangun basis legitimasi yang sangat kuat dalam masyarakat.

Karena dalam proses membangun legitimasi sesungguhnya pengetahuan itu mendahului nilai. Sebagai contoh pada tahun 1945 ABRI selain mengangkat senjata, juga bertani, serta melakukan fungsi-fungsi sipil lainnya. Itu merupakan pengetahuan sejarah. Tetapi kemudian pengetahuan yang bersifat kognitif itu ditarik menjadi sesuatu yang bersifat normatif. Bahwa dwifungsi ABRI bukan hanya sebuah kenyataan tetapi sebuah kebaikan, sebuah kewajaran. Di sini ada proses transfer dari proses kognitif menjadi proses normatif.

### **TNI, Orde Baru, dan Situasi Global**

Harus diakui bahwa sejarah Indonesia telah mendesain tentaranya menjadi kekuatan yang mandiri dan tidak diam begitu saja terhadap soal-soal politik. Proses pembentukan negara Indonesia telah menyeret tentara dalam situasi yang kemudian disebut "dwifungsi". Namun, benar juga bahwa hal ini membuat batas antara ranah politik dan perang, antara tugas-tugas sipil dan militer, makin tidak jelas. Antara perang dan politik ibarat dua sisi pada sekeping mata uang. Perang adalah jalan lain dari politik. Inilah yang terjadi pada awal pembentukan Indonesia. TNI memang sangat terobsesi oleh sejarahnya sendiri yang dihayati sebagai sesuatu yang khas. Seperti pendapat Salim Said (2001) yang menyatakan bahwa: "Kekhasan tentara Indonesia karena ia menciptakan dirinya sendiri". Disebut menciptakan dirinya sendiri, karena tentara Indonesia tidak diciptakan oleh suatu pemerintahan maupun partai politik. Dengan kata lain, TNI memandang dirinya sebagai tentara yang memiliki jatidiri yang berbeda dengan tentara di negara lain. Karena itu, peleburan batas antara fungsi pertahanan keamanan dan kehidupan sehari-hari rakyat dipahami sebagai sesuatu yang historis dan khas Indonesia. TNI memandang dirinya sebagai komponen bangsa yang punya tanggung jawab historis terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia.

Pemahaman yang demikian ini menghasilkan perspektif penting bagi tingkah laku TNI yaitu "doktrin perang rakyat semesta" (*total war*) sebagai kerangka untuk melihat Indonesia. Dalam doktrin ini Indonesia dibayangkan selalu berada di bawah ancaman perang, dan ancaman perang itu tidak hanya datang dari luar negeri tetapi juga dari dalam negeri. Perang tidak hanya berupa kekerasan fisik tetapi juga ancaman yang bersumber pada bidang-bidang sosial, ekonomi, politik, bahkan budaya. Dengan membayangkan Indonesia sebagai negara yang senantiasa dibayangi *total war*, TNI merasa ikut

bertanggung jawab atas segala yang dianggapnya sebagai perang, baik dalam bentuk yang tersamar maupun nyata. Karena itu, TNI juga merasa perlu membekali diri dengan pengetahuan dan ketrampilan di luar kemiliteran. Inilah yang dalam perkembangannya disebut-sebut sebagai "profesionalisme baru" militer. Namun sayangnya TNI sendiri yang bertindak sebagai dokter untuk menentukan diagnosis perang sekaligus menurunkan resep pengobatannya. Karena basis pemahamannya adalah perang, tidak perlu heran jika TNI dan rezim Orde Baru cenderung menggunakan model analisis, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, yang biasa disebut AGHT dalam menafsirkan lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang dimasukinya. Model analisis demikian cenderung melihat perbedaan atau hal-hal yang berada di luar garis resmi sebagai AGHT yang harus diperangi. Karena itu, Orde Baru juga cenderung mengedepankan pendekatan keamanan sebagai terapinya (Agus Wirahadikusumah, 1999: 318).

Orde Baru yang dikomandani oleh seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat adalah karena juga berkat konstelasi global dunia pada saat itu. Orde Baru lahir dan berkembang saat dunia mengalami bipolar antara kekuatan Blok Barat (kapitalis) yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur (komunis) yang dipelopori oleh Uni Soviet yang kemudian populer dengan sebutan "Perang Dingin". Orde Baru bukanlah entitas yang netral dari tarikan dua kekuatan dunia tersebut. Di antara dua tarikan kekuatan dunia itulah rezim Orde Baru memainkan klaim-klaim politiknya di dalam negeri. Karena itu, pandangan dan pilihan politik Orde Baru untuk melawan komunis di Indonesia juga mendapat dukungan dari negara-negara kapitalis. Rejim Orde Baru merasa memperoleh pembenar dan dukungan internasional ketika hendak menerapkan politik "keamanan dan ketertiban". Komunisme dengan segenap variannya merupakan isu strategis yang dapat dieksploitasi terus menerus untuk ditampilkan sebagai kambing hitam. Atau dengan perkataan lain sebagai sumber ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban nasional. Dalam bingkai keamanan dan ketertiban ini pula rezim Orde Baru melihat perbedaan, pluralisme, dan utamanya SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) di Indonesia sebagai potensi ancaman, sebagaimana komunisme dipandang sebagai sumber ancaman bagi keamanan dan ketertiban. Untuk menekan pluralisme inilah Orde Baru membakukan penafsiran Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi setiap kekuatan sosial politik yang ada.

Nyaris tidak ada tekanan atau kritik yang berarti dari masyarakat internasional terhadap apapun yang dilakukan rezim Orde Baru. Di sinilah rezim Orde Baru memperoleh keuntungan berlipat ganda. Pilihan politiknya berhasil meyakinkan negara-negara kapitalis untuk merogoh koceknya. Bahkan pembangunan pun dirancang atas nasehat mereka. Selanjutnya kapital yang dibutuhkan untuk menggerakkan pembangunan mengalir secara lancar. Secara bertahap Indonesia lalu muncul sebagai negara bekas jajahan yang sering mendapat pujian internasional sehubungan dengan pembangunan ekonomi yang dicapainya, meskipun jumlah hutangnya juga membengkak. Bahkan laporan Bank Dunia 1995 menempatkan Indonesia sebagai negara yang mengalami peningkatan status ekonomi dari kelompok negara-negara berpendapatan rendah menjadi negara-negara berpendapatan menengah.

TNI semakin kehilangan orientasinya, karena semakin pragmatis dan agresif. TNI bukan saja menentukan keputusan-keputusan di luar wewenang dan keahliannya, tetapi juga hadir secara fisik di berbagai lembaga pemerintahan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, bahkan sampai ke pedesaan. Lebih jauh TNI juga hadir di dunia bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara kelembagaan melalui institusi bisnis yang didirikannya maupun secara personal. Implementasi "dwifungsi" yang salah satunya dioperasikan melalui konsep "penugaskaryaan" lalu menjadi istilah yang melembaga dengan makna yang semakin pragmatis, misalnya menjadi presiden, menteri, gubernur, bupati, dan jabatan-jabatan lain yang strategis. Doktrin tersebut telah memberikan implikasi yang sangat kompleks bagi prajurit TNI baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis (Agus Wirahadikusumah, 1999: 321). Akibatnya TNI tampak enggan melepaskan dwifungsinya yang memang sangat menenangkan itu. Selanjutnya TNI selalu menyebut dirinya sebagai stabilisator dan dinamisator sambil menciptakan kesan seolah-olah masyarakat sipil tidak pernah siap mengurus negara. Inilah yang membuat TNI semakin tidak jelas keberpihakannya dan jatuh pada pelukan orang-perorang atau kelompok. TNI lalu tampak bukan sebagai prajurit profesional yang berwibawa, tetapi terperosok sebagai sosok yang mengamankan kepentingan perseorangan atau kelompok tertentu. Suatu citra yang benar-benar memprihatinkan bagi prajurit TNI yang menghayati jati dirinya sebagai tentara nasional.

Sebenarnya, Orde Baru mulai kehilangan aktualitasnya sejak memasuki dekade 90-an. Artinya, memasuki dekade tersebut, rezim Orde Baru harus sudah mulai mereformasi diri, dan bukan sebaliknya

malah memperkuat pembenaran terhadap hal-hal yang sudah kurang sesuai lagi. Situasi dunia yang turut memformat Orde Baru telah mengalami perubahan yang signifikan. Sejak itu persaingan ideologis antara Blok Barat (kapitalisme) dan Blok Timur (komunisme) mulai mencair. Dunia pada saat itu tengah mengalami perubahan yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Perubahan itu ditandai oleh runtuhnya Uni Soviet. Negara yang pada saat itu dikenal sebagai salah satu super power di samping Amerika Serikat, mengalami perubahan internal yang sangat mendasar. Implikasinya lalu juga meruntuhkan struktur Barat dan Timur, yang secara simbolis ditandai oleh runtuhnya tembok Berlin (penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur). Perubahan tersebut mempunyai arti politis dan ideologis karena komunisme sebagai ideologi politik dengan begitu juga kehilangan legitimasinya, meskipun beberapa negara masih bertahan seperti RRC, Korea Utara, Kuba, dan sekaligus pengakuan atas keunggulan kapitalisme yang disponsori Amerika Serikat. Negara-negara blok Timur satu persatu mereformasi diri untuk selanjutnya mengintegrasikan diri ke dalam mekanisme dunia yang dipimpin oleh negara-negara kapitalis. Produk-produk kapitalis yang tadinya haram, tiba-tiba diburu dan dipuja-puja. Secara simbolis, hal ini memperlihatkan bagaimana term-term ideologis komunisme mulai ditinggalkan dan selanjutnya menyesuaikan diri dengan term-term dunia kapitalisme. Sementara itu, secara politis, kekuatan dan kekuasaan serta pengaruh dan kewenangan menjadi beragam berkat masyarakat yang semakin terbuka. Kekuasaan menjadi mencair dan tersebar, tidak lagi memusat pada negara. Inilah yang sering disebut sebagai era kebangkitan *grass roots*. Sejalan dengan itu isu-isu yang berhubungan dengan penguatan masyarakat seperti demokratisasi, keterbukaan, kebebasan, HAM, dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam semakin diterima sebagai isu global. Sebelumnya isu-isu tersebut tenggelam oleh kuatnya tarik-menarik persaingan ideologis antara kubu Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Menghadapi fenomena baru tersebut seharusnya rezim Orde Baru juga melakukan perubahan yang signifikan. Tetapi Orde Baru menanggapi kondisi tersebut dengan setengah hati. Orde Baru menganggap isu tersebut sebagai siasat negara maju untuk menekan negara berkembang. Globalisasi hanya dipandang sebagai sumber ancaman atau bentuk penjajahan baru. Orde Baru memilih mempertahankan praktik politik otoritarianisme dan menolak perubahan atas nama nasionalisme.

## Reposisi Peran TNI

Dalam sistem politik Indonesia yang bercorak neopatrimonial, kekuasaan memusat pada diri Soeharto dengan mempergunakan ABRI, Golkar dan Birokrasi Sipil sebagai alat kekuasaan. Meskipun demikian satu hal yang patut dicatat dengan tinta emas adalah bahwa pada hari-hari menjelang jatuhnya Soeharto ternyata tidak ada niatan dari pimpinan militer saat itu untuk mengambil alih kekuasaan atau melancarkan kudeta. Hal ini membuktikan bahwa konsep jalan tengah dari A.H. Nasution, sebagai upaya untuk menghindari tradisi kudeta yang berlaku di Amerika Latin yang diperkenalkan tahun 1950-an, telah melembaga ke dalam hati sanubari para pimpinan militer meskipun di kalangan militer masih terdapat personil-personil yang pro Soeharto atau pro *status quo* (Ryamizard Ryacudu, 1999:86). Begitu pimpinan ABRI menyatakan diri sebagai kekuatan reformis dan membuktikannya dengan beberapa tindakan, maka perubahan sikap dan tingkah laku itu secara otomatis terjadi di kalangan bawahan. Dari segi pemikiran sebenarnya gagasan reformasi itu sudah menyebar di kalangan bawahan. Pimpinan TNI dengan tegas menunjukkan komitmennya untuk mendukung reformasi secara konstitusional, maka reformasi internal secara bertahap dilaksanakan dalam proses regenerasi. Dengan demikian reformasi internal TNI secara menyeluruh masih akan memakan waktu yang cukup lama. Upaya reformasi internal diawali dengan reorganisasi, reaktualisasi, reposisi dan proses regenerasi pimpinan TNI, walaupun *social and political cost* yang harus dibayar terlampaui mahal terutama dalam upaya mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap TNI yang telah mulai memudar.

Sebagai konsekuensi dari kekeliruan masa lalu di mana ABRI digunakan sebagai alat oleh Soeharto sebagai penguasa tunggal dalam sistem politik neopatrimonial, maka dengan jatuhnya era pemerintahan Soeharto membawa dampak yang lebih parah pada ABRI dan Golkar bila dibandingkan dengan birokrasi sipil. Dampak dari berakhirnya era kepemimpinan Soeharto akan lebih tampak di lingkungan pimpinan TNI dan di Golkar karena kekuatan pro-Soeharto akan berusaha mempertahankan posisinya dan diri mereka sendiri. Akibatnya ABRI dan Golkar menjadi bulan-bulanan kritik dan hujatan rakyat mulai sejak dari awal reformasi sampai berakhirnya pemerintahan transisi nanti. Di tengah-tengah protes terhadap sikap ABRI yang dinilai masih berada di bawah pengaruh Soeharto itu, masyarakat menuntut adanya pelanggaran HAM secara besar-besaran

yang dilakukan ABRI di Aceh, Irian Jaya, Timor Timur, sebagai daerah operasi militer (DOM) pada masa Orde Baru yang masih tetap berlangsung hingga saat ini. Pelaksanaan DOM di berbagai tempat dinilai telah mengakibatkan jatuhnya korban ribuan penduduk setempat baik perempuan, lelaki, maupun anak-anak, yang divonis sebagai akibat keganasan operasi militer yang dilancarkan oleh ABRI. Berkembangnya isu negatif terhadap pemberlakuan DOM di beberapa propinsi itu, di satu pihak memicu munculnya kekuatan separatis yang menuntut pemisahan diri dari negara kesatuan RI. Di pihak lain, justru menyulut terjadinya konflik primordial di Ambon dan Kalimantan Barat, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta. Semuanya itu menghasilkan hujatan yang datang secara bertubi-tubi ke tubuh ABRI.

Bahkan tuntutan itu terus berantai menuju ke arah diakhirinya dwifungsi ABRI dengan segala bentuk dan implementasinya. Walaupun hampir setiap hari, dapat dikatakan tiada hari tanpa demonstrasi dan hujatan terhadap ABRI, hampir semua tuntutan itu sudah dipenuhi oleh ABRI melalui 14 langkah reformasi yang dilaksanakan oleh ABRI, namun protes dan hujatan terhadap ABRI tiada hentinya. Hal itu berkaitan dengan kepentingan kelompok tertentu dan adanya penilaian terhadap sikap pimpinan ABRI yang belum tuntas untuk menyelesaikan masalah-masalah mendasar, yang bertujuan untuk memecah belah ABRI dan membentuk opini masyarakat agar tidak percaya pada ABRI yang diharapkan oleh kelompok tersebut agar kemandirian ABRI dan rakyat yang telah terbina selama ini dapat dipisahkan. Keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Perwira terhadap kasus Letjen TNI Prabowo dan kasus Jaksa Agung Andi M. Ghalib, oleh sekelompok masyarakat dinilai belum mencerminkan tindakan tegas dan transparan dari pimpinan TNI sehingga semakin mengental opini masyarakat yang melahirkan kesan bahwa pimpinan TNI cenderung melindungi personil-personil TNI, meskipun personil tersebut jelas bersalah. Akibatnya meskipun TNI telah mengambil 14 langkah yang bercorak reformis, namun kepercayaan rakyat masih belum dapat dipulihkan. Penyebabnya adalah kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan warga TNI, dan adanya pemberitaan media massa yang sering merugikan posisi TNI. Karena itu kecurigaan rakyat tetap saja diarahkan kepada langkah-langkah TNI.

Dalam situasi penuh hujatan dan protes tersebut dan dengan terpisahnya Polri dari struktur organisasi ABRI diubahlah nama ABRI menjadi TNI. Dengan perubahan ini maka tiga dimensi yang ingin

dikayuh yaitu masa lalu (1947), masa kini yang porak poranda dan proteksi ke masa depan dengan harapan terwujudnya idealisasi peranan TNI yang lebih baik pada masa yang akan datang. Secara historis paradigma yang lahir dengan nama TNI tersebut (1947) adalah paradigma yang lahir secara alamiah sejalan dengan perjuangan TNI saat itu. Secara teoritis, terbentuknya TNI itu melahirkan gerakan yaitu gerakan untuk mempertahankan dan memperjuangkan Negara Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Gerakan itu dijiwai oleh ide yang terkandung pada nama TNI yaitu sebuah organisasi yang memiliki ruang lingkup nasional terbuka untuk semua suku bangsa. Adapun paradigmanya pada waktu itu ialah idealisme seperti yang tercermin dalam amanat Panglima Besar Sudirman yang menegaskan bahwa TNI adalah alat negara. Tegasnya dengan paradigma itu TNI berada di atas semua partai dan golongan. Etos kerja yang lahir pada waktu itu ialah berjuang sampai titik darah penghabisan tanpa memiliki pamrih apapun kecuali membela bangsa dan negara. Dengan kembali ke nama TNI maka diharapkan sepak terjang TNI senantiasa mencerminkan sepak terjang dari sebuah gerakan ide, yang memiliki paradigma, etos kerja, dan kode etik dari tingkah laku TNI. Untuk memainkan peranan sebagai pengawal kedaulatan negara dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Kendala yang merupakan kelemahan TNI terletak pada belum efektifnya fungsi jaringan dan kemampuan komunikasi dialogis dengan pihak eksternal. Sesungguhnya jalinan komunikasi dialogis eksternal yang menjadi kunci untuk memahami belum terbentuknya gerakan, paradigma, etos kerja dan etika, telah tersedia dalam prinsip TNI berasal dari rakyat, maka inti persoalannya adalah terletak belum pulihnya kepercayaan rakyat pada TNI. Dengan demikian pemulihan kepercayaan rakyat merupakan masalah utama yang harus dipecahkan oleh pimpinan TNI beserta seluruh warga TNI.

Memposisi ulang format TNI dalam kehidupan bernegara bukanlah hal mudah. Kenikmatan kekuasaan yang pernah dirasakan hampir setengah abad merupakan kendala terberat selama ini. Hal itulah yang menyebabkan keretakan hubungan sipil militer selamaini. Kondisi itu berawal pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin dulu, TNI mulai secara perlahan mencaplok lahan-lahan strategis pihak sipil di kabinet, yang merembet terus hingga berakhirnya Orde Baru. Sipil tidak lagi diberi kewenangan untuk melakukan fungsi-fungsi kenegaraan, karena posisi mereka diambil alih atau tergantikan peran sosial politik TNI. Puncaknya, pada tahun 1980-an, saat itu hampir seluruh jabatan politik dan bahkan jabatan karier yang

strategis diisi oleh TNI dan purnawirawan TNI. Hal inilah yang perlu direposisi ulang.

Redefinisi TNI menjadi hal yang sangat penting dalam rangka demokratisasi saat ini. Sebab mendefinisikan TNI sebagai manusia unggul seharusnya mulai dirubah. Perubahan itu harus dimulai dari sekolah-sekolah kemiliteran dari akademi militer hingga sekolah gabungan TNI (sekolah tertinggi TNI). Bila jargon dan pendefinisian itu selalu kita kedepankan, maka yang muncul kemudian adalah rasa superioritas dari pihak militer terhadap pihak sipil. Pendefinisian yang berlebihan terhadap entitas militer secara tidak langsung akan membentuk image bahwa TNI berhak menduduki semua lini kehidupan bernegara, dengan dalih kedisiplinannya, kesiapsiagaannya serta kekuatannya. Oleh karena itu, doktrin-doktrin militer yang diajarkan selama ini sebaiknya diinjau kembali. Bila TNI mampu meredefinisikan dirinya maka tindakan selanjutnya yang harus didahulukan ialah memperbaiki fungsi TNI sebagai abdi negara dan abdi masyarakat bukan abdi penguasa.

TNI seharusnya berusaha menolong, mendorong, dan memberi jalan bagi sipil untuk bangkit dari keterpurukannya selama hampir 50 tahun. TNI sebagai kekuatan militer merupakan subsistem negara yang mengemban tugas dalam bidang pertahanan dan keamanan. TNI atau militer tidak bermain politik tetapi melaksanakan keputusan politik. Oleh karena itu reposisi TNI amat diperlukan, karena hal itu dapat berimplikasi positif terhadap hubungan sipil militer yang selama ini tidak pada posisinya. Untuk itu, konsep pengabdian yang harus dilakukan TNI kini adalah konsep pengabdian pada negara yang berorientasi pada kedaulatan rakyat. Konsep profesionalisme TNI diwujudkan dalam rangka penegakan dan pelaksanaan Sapta Marga, bukan lagi melanggengkan konsep dwifungsi ABRI. Sikap netral sebagai alat negara menjadi jiwa setiap prajurit TNI. Dengan demikian persamaan hak dan kewajiban di antara sipil dan militer dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya.

## Penutup

Peniadaan peran sosial politik ABRI didasarkan oleh dua pertimbangan. Pertama, ada kekhawatiran bahwa peran sosial politik ABRI akan mengurangi profesionalisme TNI. Kedua, peran sosial politik ABRI dinilai menghambat proses demokratisasi. Organisasi militer yang sangat hirarkhis dan disiplin yang sangat ketat akan

mempersulit partisipasi massa yang menuntut adanya kebebasan menyatakan pendapat dan kemampuan bertindak secara otonom. Peran sosial politik ABRI tidak lebih dari sekadar legitimasi peran politik ABRI. Keterlibatan ABRI dalam masalah-masalah non-hankam hanya diperlukan dalam keadaan darurat. Setelah keadaan darurat berakhir yang perlu ditegakkan adalah *rule of law*, bukan lagi pendekatan yang mengandalkan kekuatan militer.

Sudah saatnya mengakhiri peran sosial politik ABRI sehubungan dengan adanya apa yang disebut sebagai penyimpangan dari jiwa dan semangat kerakyatan ABRI sebagaimana ditekankan oleh Bapak Pendiri Tentara Nasional Indonesia di awal kelahirannya. Seberapa jauh TNI adalah tentara rakyat yang membela kepentingan rakyat, TNI adalah aset nasional yang utuh, yang percaya akan kekuatan sendiri, UUD 1945 adalah politik tentara sungguh-sungguh telah diimplementasikan.

#### Daftar Pustaka

- Agus Wirahadikusumah. (1999). "TNI Menghadapi Tantangan Masa Depan", Dalam *Indonesia Baru dan Tantangan TNI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Agus Wirahadikusumah. (1999). "Reformasi TNI", Dalam *Indonesia Baru dan Tantangan TNI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Daniel Dhakidae. (1999). "Orde Baru dan Peluang Demokrasi", Dalam *ABRI dan Kekerasan*. Yogyakarta: Dian interfidei-Kompas dan Forum Wacana Muda.
- Indria Samego. (1999). *Bila ABRI Menghendaki*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Nadjib Asca. (1999). "Publik dan Wacana ABRI", Dalam *ABRI dan Kekerasan*. Yogyakarta: Dian Interfidei-Kompas dan Forum Wacana Muda.
- Ryamizard Riacudu. (1999). "Konsistensi dan Komitmen TNI" Dalam *Indonesia Baru dan Tantangan TNI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Salim Said. (2001). *Wawancara tentang Tentara dan Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

### **Biodata Penulis**

**Sunarso**, lahir di Karanganyar, 21 Mei 1960. Lulus S-1 Fisipol UGM Yogyakarta tahun 1985. Lulus S-2 Ketahanan Nasional PPS UGM Yogyakarta 1995. Sejak tahun 1987 menjadi tenaga pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

